



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019
KKP KELAS I SOEKARNO-HATTA**

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KKP Kelas I Soekarno-Hatta
Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, atas Rahmat dan Karunianya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta telah diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 ini merupakan salah satu acuan semua Bidang dan Bagian di Lingkungan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian indikator kinerja dalam kurun waktu tahun 2019 berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya akan berupaya menurunkan penyakit menular, penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas lingkungan di Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma.

Harapan kami semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 ini dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, yang telah membantu / berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 ini.

Tangerang, Januari 2019
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta,



dr. Anas Ma'ruf, MKM
NIP 197005202002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	3
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	4
	A. Visi	4
	B. Misi	4
	C. Tujuan	5
	D. Sasaran	5
BAB III	INDIKATOR KINERJA	7
BAB IV	PENUTUP	17
LAMPIRAN		

BAB I

LATAR BELAKANG

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Pembangunan Kesehatan Nasional adalah upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta dengan memperhatikan tantangan global maupun spesifik lokal dengan sasaran dalam Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno-Hatta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. KKP Kelas I Soekarno-Hatta berkedudukan di Bandara Soekarno-Hatta sebagai kantor induk dengan wilayah kerja di Bandara Halim Perdanakusuma.

Saat ini Bandara tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang menjadi sentra industri, pusat perdagangan, dan tempat wisata. Bandara Soekarno-Hatta merupakan Bandara terbesar di Indonesia, memiliki aktivitas tinggi dalam pergerakan pesawat, barang maupun orang. Tingginya mobilitas ini, dapat meningkatkan faktor resiko penyakit dan mempercepat penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain.

Pembangunan kesehatan di wilayah Bandara merupakan bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Sejak tahun 2014 Indonesia telah mampu melaksanakan implementasi penuh *International Health Regulation (IHR) 2005*, karena hasil evaluasi kapasitas inti di pintu masuk Negara atau *Point of Entry* menunjukkan telah memnuhi syarat oleh tim evaluasi. Hal ini ditandai dengan terpenuhnyasecara optimal *core capacities* minimal Negara dalam mendeteksi, melaporkan, dan merespon suatu kejadian yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD). Kemampuan Indonesia telah implementasi penuh IHR (2005) merupakan prestasi tersendiri dalam pembangunan kompetensi di bidang kesehatan, dimana diantara Negara regional Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand sudah menyatakan implementasi penuh IHR 2005.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta berperan dalam cegah tangkal penyakit di pintu gerbang Negara dengan menjalankan tugas yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaa Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011;
6. International Health Regulation (IHR) tahun 2005;
7. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
8. Rencana Aksi Program Ditjen P2P Kemenkes RI Tahun 2015-2019.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) KKP Kelas I Soekarno-Hatta Tahun 2019 tidak ada visi dan misi unit kerja, namun mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia.

A. VISI

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “

B. MISI

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Bangsa berdaya saing
6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk mencapai visi misi tersebut, dikeluarkan kebijakan sembilan agenda prioritas atau Nawa Cita. KKP Kelas I Soekarno-Hatta sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, ikut berperan dalam Pembangunan Kesehatan Nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia demi terwujudnya agenda ke-5 dari Nawa Cita yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.”

C. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta dalam periode tahun 2015 – 2019, sejalan dengan Renstra Kementerian Kesehatan adalah menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, serta meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan.

D. SASARAN

Selaras dengan sasaran program P2P dalam Rencana Aksi Program P2P 2015-2019, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta adalah “Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara”, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB	1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan	600 sertifikat
		2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP	100 %
		3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit	39.024 sertifikat
		4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus	20 layanan
		5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	1 bandara
		6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan	60.000 sertifikat
		7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi	2 bandara
2	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic	8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area	2 bandara
3	Menurunnya penyakit menular langsung	9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung	1.100 orang
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	40 dokumen
		11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P	9 pelatihan
		12. Jumlah pengadaan sarana prasarana	150 unit

BAB III

INDIKATOR KINERJA

Kegiatan yang dilakukan KKP Kelas I Soekarno-Hatta pada dasarnya adalah dalam rangka cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma melalui program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator kinerja dan kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekearifinaan Kesehatan

a. Definisi Operasional

Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekearifinaan kesehatan dalam periode satu tahun.

Pemeriksaan alat angkut yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta terdiri dari pengawasan sanitasi pesawat dan pengawasan hapus serangga /disinseksi pesawat.

- Kegiatan pengawasan sanitasi pesawat dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi pesawat dilakukan dengan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap pesawat yang diperiksa. Pesawat dengan hasil inspeksi baik akan diterbitkan sertifikat sanitasi pesawat (Sertifikat Bebas Serangga), sedangkan pesawat dengan hasil inspeksi tidak baik atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan direkomendasikan untuk dilakukan tindakan penyehatan.
- Penerbitan sertifikat hapus serangga merupakan akhir rangkaian kegiatan pengawasan kegiatan hapus serangga agar memenuhi persyaratan yang ditentukan. Aspek yang diawasi meliputi bahan disektan yang digunakan dan pelaksanaan disinseksi. Jika disinseksi telah dilaksanakan sesuai persyaratan dan jumlah bahan disektan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, maka diterbitkan Sertifikat Hapus Serangga / Knock Down (KD). Hal ini diberlakukan bagi pesawat yang berangkat menuju negara tertentu yang mempersyaratkan

b. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC dalam satu tahun. PHQC dalam hal ini yaitu sertifikat Knock Down dan SSCEC yaitu sertifikat sanitasi pesawat.

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekejarantinaan Kesehatan yaitu 600 sertifikat yang terdiri dari 120 sertifikat Knock Down dan 480 sertifikat sanitasi pesawat.

2. Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana Di Wilayah Layanan KKP

a. Definisi Operasional

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun.

b. Cara Perhitungan

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB dikali 100%.

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB, dan bencana di wilayah layanan KKP yaitu 100%.

3. Jumlah Deteksi Dini Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit

a. Definisi Operasional

Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun.

Deteksi dini yang dilakukan di KKP Kelas I Soekarno-Hatta terdiri dari:

1) Penerbitan COP

COP atau Certificate of Pratique (Free Pratique) adalah sertifikat izin bebabs karantina yang diberikan kepada kapal yang datang dari luar negeri atau daerah terjangkau

2) Pemeriksaan Gendec

Pemeriksaan Health Part of General Declaration (Gendec) merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat yang diisi oleh pursher/pilot, berupa catatan adanya orang sakit selama penerbangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui ada/tidaknya penumpang/crew berpenyakit menular. Pemeriksaan dilakukan dengan cara *boarding* ke pesawat yang datang dari Luar Negeri atau dengan mengamati Gendec yang didapat dari *Groundhandling*.

3) Surveilans Rutin

Pengumpulan, pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma dilakukan dengan cara pengambilan data distribusi penyakit dari poliklinik KKP dan non KKP Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

b. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec dan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya dalam satu tahun.

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit yaitu 39.024 sertifikat yang terdiri dari 600 sertifikat COP, 38.412 dokumen Gendec, dan 12 laporan surveilans rutin.

4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus

a. Definisi Operasional

Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain - lain dalam periode satu tahun.

Pelayanan kesehatan pada situasi khusus atau kondisi matra meliputi rawat jalan umum dan rujukan (Ambulan). Adapun kegiatannya yang terkait dengan antara lain: Pelayanan kesehatan terbatas pada TKI/O/B, Posko Natal, Posko Mudik Lebaran, Pelayanan Kesehatan Haji, Keadaan Matra Lain.

b. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru dan lainnya dalam satu tahun.

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus yaitu 20 layanan.

5. Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Mempunyai Kebijakan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah

a. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.

Rencana Kontijensi mencakup proses membuat perencanaan atau menyusun strategi dan prosedur dalam menanggapi potensi krisis atau kedaruratan yang akan terjadi. Termasuk pengembangan skenario (untuk mengantisipasi krisis), menentukan tanggung jawab semua pelaku yang akan terlibat, mengidentifikasi peran dan sumber daya, proses pendataan

dan penyebaran informasi, pengaturan setiap pelaku sehingga siap pada saat dibutuhkan dan menentukan kebutuhan agar tujuan tercapai.

b. Cara Perhitungan

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah.

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah yaitu 1 bandara.

6. Jumlah Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah yang Diterbitkan

a. Definisi Operasional

Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima dalam periode satu tahun.

b. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun.

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan yaitu 60.000 sertifikat/surat ijin.

7. Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi

a. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan.

Untuk mengetahui kualitas sanitasi tempat-tempat umum, TPM, dan sarana air bersih, dilakukan pemeriksaan sanitasi sebagai berikut:

- 1) Kegiatan inspeksi sanitasi gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.
- 2) Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan menyeluruh mulai pemeriksaan hygiene bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat, peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Uji petik pengambilan sampel dilakukan terhadap sampel makanan, sampel usap alat makan serta sampel usap tangan penjamah juga sampel air minum yang digunakan untuk proses pengolahan.
- 3) Pemeriksaan air bersih meliputi pemeriksaan fisik, uji petik pengambilan sampel air minum untuk dilakukan pengujian laboratorium baik bakteriologi maupun kimia. Pengawasan dimulai dari titik sumber air yang didistribusikan (*Water Pumping System* milik PT. Angkasa Pura II) sampai ke titik yang diterima oleh konsumen seperti *drinking water*, *water car*, kran-kran yang ada di tempat pengelolaan makanan dan air-air kran yang berada di bandara.

b. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan.

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi yaitu 2 bandara yang terdiri dari Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

8. Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area

a. Definisi Operasional

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, HI buffer < 1 , tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6 .

Upaya yang dilakukan agar Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma bebas vektor terdiri dari :

- 1) Kegiatan pengendalian vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.
- 2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian nyamuk dilakukan terhadap larva dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva. Pengamatan nyamuk dewasa dilakukan dengan metode Resting Collection yakni dengan menangkap nyamuk dewasa yang sedang beristirahat dengan menggunakan aspirator dan diperkirakan *Aedes sp.*
- 3) Kegiatan pengamatan lalat dan kecoa dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan lalat dan kecoa kemudian dilakukan pengendalian dengan insektisida pada lokasi tersebut.

b. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6 dalam satu tahun.

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area yaitu 2 bandara yang terdiri dari Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

9. Jumlah Orang yang Melakukan Skrining Penyakit Menular Langsung

a. Definisi Operasional

Jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya.

b. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya dalam satu tahun.

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung yaitu 1100 orang yang terdiri dari 500 orang pemeriksaan HIV dan 600 orang pemeriksaan TB.

10. Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

a. Definisi Operasional

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 11 jenis Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBPN, Dokumen Kepegawaian, e monev DJA, e monev Bappenas, LEB dalam periode satu tahun.

b. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen terdiri dari:

- RKAKL/DIPA (awal dan revisi) : 2 dokumen
- Laporan Tahunan : 1 dokumen
- Laporan Keuangan : 2 dokumen
- Laporan BMN : 2 dokumen
- Laporan Akuntabilitas Kinerja : 1 dokumen
- Profil : 1 dokumen
- Proposal PNBP : 1 dokumen
- Dokumen kepegawaian (kontrak dan penilaian) : 2 dokumen
- e monev DJA : 12 dokumen
- e monev Bappenas : 4 dokumen
- LEB : 12 dokumen

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yaitu 40 dokumen.

11. Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana

a. Definisi Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan khusus, alat pengolah data pelayanan vaksinasi online, sarana prasarana penunjang pelayanan masyarakat dan pengadaan peralatan poliklinik penunjang pelayanan masyarakat dalam satu tahun.

b. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah pengadaan kendaraan khusus, alat pengolah data pelayanan vaksinasi online, sarana prasarana penunjang pelayanan masyarakat dan pengadaan peralatan poliklinik penunjang pelayanan masyarakat dalam satu tahun.

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator jumlah pengadaan sarana prasarana yaitu 150 unit yang terdiri dari alat kesehatan, alat pengolahan data, fasilitas perkantoran, dan kendaraan khusus (ambulans golf car).

12. Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)

a. Definisi Operasional

Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM dalam kurun waktu satu tahun.

b. Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM Kdalam kurun waktu satu tahun.

c. Target Indikator

Pada tahun 2019 ditetapkan target indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yaitu 9 jenis pelatihan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua Bidang dan Bagian di Lingkungan KKP Kelas I Soekarno-Hatta dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian indikator kinerja dalam kurun waktu tahun 2019

Kegiatan yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta tahun 2019 berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya akan berupaya menurunkan penyakit menular, penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas lingkungan di Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Halim Perdanakusuma.

Penyusunan RKT ini disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan setiap program/kegiatan dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja KKP Kelas I Soekarno-Hatta.

Kami sadar bahwa dalam proses penyusunan RKT tahun 2019 masih banyak kekurangan baik dalam penyusunan data, kalimat, dan jumlah angka yang belum sesuai yang diharapkan semua pihak. Oleh sebab itu dengan senang hati menerima tanggapan, kritikan, masukan dan bimbingan demi kesempurnaan dan keberhasilan program kami.

Tangerang, Januari 2019
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Soekarno-Hatta,



dr. Anas Ma'ruf, MKM
NIP 197005202002121003

LAMPIRAN

**MATRIKS KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2019
KKP KELAS I SOEKARNO-HATTA**

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PAGU
1	Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan		48.400.000
		Pengawasan tindakan penyehatan alat angkut	36.400.000
		Penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan (sertifikat sanitasi pesawat)	12.000.000
2	Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP		150.702.000
		Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular berbahaya	29.500.000
		Pengadaan bahan kekarantinaan	121.202.000
3	Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit		2.146.800.000
		Koordinasi program karantina kesehatan	116.520.000
		Bimtek kekarantinaan ke wilker	7.020.000
		Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA	1.350.000
		Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP	132.000.000
		Layanan kekarantinaan kesehatan di Bandar Udara	1.842.885.000
		Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan	47.025.000
4	Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus		2.305.868.000
		Pengawasan arus mudik pada situasi khusus	227.920.000
		Pelayanan kesehatan	1.911.980.000
		Layanan kesehatan rujukan	31.500.000
		Koordinasi pelayanan kesehatan arus mudik	15.900.000
		Koordinasi dan konsultasi teknis pelayanan kesehatan	32.748.000
		Rapat persiapan dan evaluasi embarkasi debarkasi haji	78.800.000
		Bimtek pelayanan kesehatan	7.020.000

5	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah		26.765.000
		Review dokumen rencana kontijensi di bandara Soetta	18.115.000
		Table Top	8.650.000
6	Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan		261.687.000
		Sistem pelaporan dan penerbitan dokumen melalui Simkespel	44.730.000
		Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan	16.957.000
		Pengadaan obat dan bahan habis pakai	200.000.000
7	Jumlah pelabuhan/bandara/PPLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi		125.355.000
		Bahan kegiatan sanitasi	9.575.000
		Rapat koordinasi program PRL	66.420.000
		Konsultasi teknis program PRL	8.400.000
		Pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan	33.940.000
		Bimtek kegiatan PRL	7.020.000
8	Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area		1.012.030.000
		Layanan capaian eliminasi malaria	400.000.000
		Layanan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit	612.030.000
9	Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung		224.382.000
		Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS	134.382.000
		Layanan pengendalian penyakit TBC	90.000.000
10	Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		29.067.169.000
		Layanan internal diluar modal dan pelatihan	1.419.218.000
		Layanan perkantoran	27.647.951.000

11	Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P		847.076.000
		Refreshing petugas TGC dalam pengendalian penyakit menular berbahaya	31.712.000
		Pelatihan petugas KKP	55.310.000
		Simulasi PKD	4.962.000
		Diklat vektor	721.570.000
		Peningkatan SDM Barjas	14.372.000
		Peningkatan kompetensi pegawai prajabatan CPNS	8.000.000
		Simulasi KKM	11.150.000
12	Jumlah pengadaan sarana prasarana		2.976.908.000
		Media display informasi kesehatan	208.998.000
		Media pengawasan sertifikat internasional	58.420.000
		Water test kit	77.000.000
		Ambulans golf car	366.085.000
		Pengolah data	144.880.000
		Fasilitas perkantoran	2.121.525.000
TOTAL			39.193.142.000

